



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA
: NEGARA
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN
: TATA USAHA NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMBAR SRI SUSILOWATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB. DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
3. NHK : **417091**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.187.226.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 347.226.000		
2. Tanah Seluas 770 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. Tanah Seluas 945 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	102.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	114.150.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	270.978.631
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.674.354.631



III. HUTANG

Rp.

8.783.154

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.665.571.477

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.